

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya peran pajak di Indonesia tidak didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila dibandingkan dengan tingkat aktivitas perekonomiannya, jumlah pajak yang diterima negara tidak sebanding dan bahkan belum optimal. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih jauh dari harapan. Salah satu fakta yang melandasi hal tersebut ditunjukkan pada tingkat *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran umum terkait kondisi perpajakan suatu negara melalui perbandingan total penerimaan pajak negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. *Tax ratio* juga memberikan gambaran terkait kepatuhan perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah oleh Databoks (2019), *tax ratio* Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 11,38%. Tetapi peningkatan tersebut tidak bertahan di tahun berikutnya. Tahun 2013, *tax ratio* turun ke angka 11,29% dan terus menurun hingga di tahun 2017 *tax ratio* jatuh ke angka 9,9%. Kemudian di tahun 2018, *tax ratio* meningkat sebesar 0,6% dan mencatat angka 10,5%. Namun,

tren penurunan beberapa tahun terakhir kembali berlanjut di tahun 2019 dan 2020 dimana *tax ratio* kedua tahun tersebut mencatat angka 9,8% dan 8,3%. Berdasarkan hasil publikasi OECD (2020) yang berjudul “*Revenue Statistics in Asian and Pacific Economie 2020*” dijelaskan bahwa pada tahun 2018 *tax ratio* Indonesia berada dibawah rata-rata negara OECD (34,3%) dan negara Afrika (17,2%). Apabila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, *tax ratio* Indonesia masih tertinggal dari *tax ratio* negara-negara tersebut (Ramadhan & Rodoni, 2021). Data tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih sangat rendah serta faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan dan kesadaran pajak harus diteliti lebih lanjut.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak yang ditunjukkan dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, salah satunya disebabkan oleh maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak semakin menurun sehingga menimbulkan stigma bahwa pajak itu ada untuk dikorupsi dan hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Stigma tersebut membuat masyarakat merasa enggan untuk membayar pajak karena masyarakat menganggap bahwa uang tersebut akhirnya juga akan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Stigma negatif masyarakat ini menjadi salah satu faktor penyebab kesadaran masyarakat untuk membayar serta melapor pajaknya rendah serta membuat kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi masyarakat dan negara menjadi tertutupi.

Dari fenomena tersebut, rendahnya kesadaran masyarakat dapat mengindikasikan dua hal, masyarakat minim literasi pajak dan sama sekali tidak tahu kewajiban perpajakan yang dimilikinya atau masyarakat tahu tetapi tidak ingin menjalankan kewajibannya karena tidak percaya bahwa kontribusi yang diberikannya akan dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, maka stigma negatif tersebut perlahan akan memudar dan tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Kunci utamanya adalah membuat masyarakat kembali percaya dan sadar akan pentingnya pajak hingga terbentuknya kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Sistem *self-assessment* akan berjalan efektif apabila kepatuhan sukarela sudah terbentuk, karena sistem *self-assessment* sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self-assessment* tercermin dari pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Apabila wajib pajak tidak jujur atau mencantumkan informasi dan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan nyatanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka hal tersebut dapat menyebabkan pajak yang terutang menjadi tidak sesuai dan tentunya akan menimbulkan kerugian pada penerimaan negara.

Penelitian terkait kepatuhan pajak menggunakan pendekatan ekonomi ataupun *behavioral* sudah banyak dilakukan. Tetapi penelitian kepatuhan perpajakan dengan pendekatan gabungan antara pendekatan ekonomi dan

*behavioral* belum banyak dipublikasikan di Indonesia. Salah satu pendekatan yang menggabungkan pendekatan ekonomi dan *behavioral* dalam menganalisis kepatuhan perpajakan adalah pendekatan *slippery slope framework* yang dikemukakan oleh Aloys Prinz, Stephen Muehlbacher dan Erich Kirchler (Mardhiah *et al.*, 2019). Pendekatan ini menjelaskan secara terperinci hubungan antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak yang dapat menjelaskan motivasi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Ramadhan & Rodoni, 2021).

Adanya keterkaitan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan pendekatan *slippery slope framework* dengan membatasi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan *Slippery Slope Framework* pada Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pendekatan *slippery slope framework*?

3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah apabila dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan berdasarkan pendekatan *slippery slope framework*?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Petisah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak berdasarkan pendekatan *slippery slope framework*.
3. Meninjau tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah apabila dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan berdasarkan pendekatan *slippery slope framework*.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pembahasan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mendukung penulisan ini, penulis melakukan survei dengan memberikan kuesioner terkait kepatuhan perpajakan pada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Kemudian hasil dari survei tersebut dikaitkan dengan pendekatan *slippery slope framework*. Tingkat kepatuhan yang dimaksud dalam penulisan ini terbatas pada tingkat kepatuhan formal. Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan agar pembahasan dalam karya tulis ini memiliki kejelasan kriteria serta

mempertimbangkan keterjangkauan objek penelitian sehingga dapat mempermudah penyelesaian penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan untuk penerapan ilmu yang telah dipelajari selama ini.
2. Menjadi sumber ataupun referensi yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam membahas permasalahan yang berhubungan dengan topik dalam karya tulis ini.
3. Menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada pendekatan atau teori terkait kepatuhan pajak.
4. Menjadi salah satu bahan pertimbangan penentuan regulasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penulis dalam mengangkat topik pada Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan *Slippery Slope Framework* pada Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian terkait penelitian terdahulu, pendekatan ataupun teori yang digunakan dalam meninjau tingkat kepatuhan pajak, serta data dan fakta terkait topik yang diteliti. Uraian dalam bab ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan uraian terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian serta pembahasan hasil penelitian berupa analisis terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan *slippery slope framework*, serta analisis terkait upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan penelitian berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang menjawab rumusan masalan serta tujuan penulisan karya tulis ini.